

# IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PASCA KONFLIK DI KOTA AMBON

Oleh: Makkulawu

## *Abstract*

*This research aims to describe the implication of social conflict to education of religion (formal and informal) implementation. This was conducted at Ambon, Maluku. Data was collected by depth interview and observation.*

*This research indicates that situation of Ambon today is normally. Learning activity (especially learning in religion subject) in school and madrasah is running well. Local government had been renovate almost school that was damaged by social conflict.*

Keyword: **implementation, education, religion, conflict**

## I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat, bahasa dan agama, yang tersebar diberbagai pulau besar dan kecil. Kemajemukan bangsa Indonesia di satu sisi memang merupakan sumber potensi kekayaan budaya bangsa yang sangat berharga, tetapi disisi lain kemajemukan bangsa Indonesia juga dapat menjadi sumber potensi ketegangan dan konflik sosial. Diantara potensi konflik yang sangat mengancam integrasi nasional adalah konflik yang bernuansa keagamaan, yang memang sejak masa lalu hubungan antara umat beragama yang berbeda tidak selalu harmonis.

Pada banyak kasus, faktor perbedaan agama bersamaan dengan perbedaan kelas ekonomi sering menjadi pemicu berbagai konflik sosial yang muncul

kepermukaan. Dan banyak kasus lainnya ditambah lagi dengan problema perbedaan suku atau ras. Dalam kurung waktu dua sampai tujuh tahun terakhir, banyak konflik bermunculan dalam bentuk kerusuhan massayangterjadi diberbagai daerah. Setiap kerusuhan memiliki permasalahan secara spesifik yang tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Dan banyak faktor yang terlibat. Namun walaupun tidak dapat dikatakan hanya semata-mata sentimen antar kelompok keagamaan dan perbedaan kelas ekonomi yang menjadi penyebab konflik, cukup terlihat jelas bahwa hal keagamaan dan ekonomi sangat mewarnai konflik-konflik yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dengan rusaknya bentuk fisik ritual keagamaan seperti rumah-rumah ibadah, sarana ekonomi karena dijadikan sasaran amukan massa.

Hasil penelitian yang dilaksanakanoleh LitbangHarian Kompas tanggal 4-18 Desember 1990 turut mendukung pernyataan di atas yang membuktikan bahwa di antara beberapa hal seperti, agama, etnis, daerah asal, pekerjaan, kondisi ekonomi, pilihan partai politik dan logat bahasa daerah, agama merupakan hal yang paling membuat masyarakattersinggung bila dilecehkan. Tercatat 78,8 % responden tersinggung bila agamanya dilecehkan, sementara untuk etnis hanya 4,4 %, daerah asal 0,4 %, pekerjaan 6,6 %, kondisi ekonomi 3,0%, pilihan partai politik 0,2% dan logat bahasa daerah hanya 0,4 %. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah hal yang paling rawan dapat mewarnai konflik-konflik terjadi.

Di Maluku/Ambon sebagai wilayah kepulauan sudah sejak zaman dahulu sarat akan konflik sosial. Konflik-konflik di Maluku/Ambon bertambah besar frekuensinya setelah kedatangan Portugis dan kemudian Belanda yang membawa agama Kristen. Terjadi konflik-konflik baik terpendam maupun terbuka, bentrokan-bentrokan fisik yang pada waktu dulu dapat diatasi dengan *pela tamrin tamagola* menyatakan bahwa dalam sejarah Maluku, khususnya Ambon ada konflik terpendam antar umat Islam dan Kristen yang dahulu pernah muncul dan sering terjadi (laporan hasil wawancara dengan pengembang kebijakan, pelaksana lapangan dan pihak-pihak terlibat dan kerusuhan di Ambon, dalam Parsudi Suparlan, 1999, h,1 8).

Karena itu untuk mengetahui secara khusus dampak konflik di Kota Ambon secara fisik maupun non fisik khususnya pendidikan agama dan keagamaan dan tindak lanjut kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan khususnya pendidikan agama dan keagamaan, maka penelitian ini menarik untuk dilaksanakan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan: Bagaimana dampak konflik sosial terhadap implementasi

pendidikan agama dan keagamaan kota Ambon, Bagaimana kebijakan pemerintah dan pejabat-pejabat terkait setempat menyikapi dampak konflik sosial terhadap implementasi pendidikan agama dan keagamaan kota Ambon, dan Bagaimana implementasi pendidikan agama dan keagamaan di kota Ambon.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan (Pemerintah) dalam rangka pengambilan kebijakan yang lebih integral dan komprehensif tentang dampak konflik sosial di Ambon.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### \* Dampak Konflik Terhadap Pendidikan Agama dan Keagamaan

Konflik sebagai gejala alami yang melekat dalam masyarakat, betapapun kecilnya konflik, ada pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, baik bersifat merugikan (negatif) maupun bersifat menguntungkan (positif) terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut ahli sosiologi seperti Lewis Coser, sebetulnyaterjadinya konflik tidak selamanya merugikan, karena optimum daripada suatu organisasi memang bukanlah semacam kompromi antara konflik dan integrasi melainkan perkembangan yang simultan dari ke duanya, sehingga meniadakan konflik sebenarnya mustahil. Bahkan menurut pada ahli sosiologi, konflik diantaranya juga menguntungkan. Sambil mengomentari proporsi-proporsi George Simmel Coser menginventarisir beberapa keuntungan konflik sosial antara lain: 1) dapat membangun dan memperkuat batas, kesadaran dan mobilisasi kelompok, 2) dapat mengurangi permusuhan yang bersifat penghancuran total dengan memberikannya penyaluran secara sedikit demi sedikit, 3) sebagai tanda adanya hubungan sosial yang rapat atau menjadi index stabilitas hubungan yang ada pertanda berjalannya "*balancing mechanism*", 4) membangun hubungan sosial dalam bentuk "*antagonistic cooperation*" dan melahirkan tipe inter-relasi baru yang lain, 5) merangsang inovasi (*col for innovations*) dan merangsang aliansi-aliansi baru (*coll families*). Tetapi untuk memperoleh keuntungan-keuntungan itu diperlukan beberapa syarat: konflik itu harus bersifat praktis dan operasional, bukan pada posisi-posisi idologis, bersifat instrumental daripada "*expressive in nature*" terbatas dan pasifik pada area tertentu datangnya (dalam hal banyak konflik) berurutan dan tidak sekaligus dalam waktu yang sama, bersifat saling menyilang (*cross cutting*) dan tidak kumulatif, serta tidak mengancam nilai dasar organisasi. Konflik yang demikian dapat diatasi, diarahkan, dikontrol dan diserap untuk kemudian diambil keuntungannya.

Dengan demikian konflik sebagai gejala alami yang melekat dalam masyarakat, nampak memang sulit dihilangkan, namun tidak berarti selamanya mewrugikan, tetapi dapat mengurangi rasa permusuhan yang bersifat penghancuran total, dapat merangsang aliansi-aliansi baru, dapat membangun hubungan social baru.

- **Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan**

Apabila kita berbicara penanggungjawab dan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada umumnya pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari upaya pelaksanaan pencapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, digariskan dalam GBHN dan dijabarkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Undang-Undang tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus dalam pendidikan agama" Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih-luas dari sekedar mata pelajaran/mata kuliah agama. Pendidikan agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

- \* **Implementasi Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Implementasi pendidikan agama dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia secara operasional mencakup dua hal yaitu: *Pertama*, lembaga pendidikan agama atau perguruan, *Kedua*, isi atau program pendidikan agama.

Dalam rangka melaksanakan amanat GBHN itu, maka di sekolah-sekolah umum diberikan pendidikan agama dalam bentuk mata pelajaran tersendiri, pembinaan/teknis edukatif pendidikan agama di sekolah-sekolah umum negeri dilaksanakan atau menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Sedangkan bidang teknis administrasi, peranti lunak dan keras tanggung jawab Diknas.

Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah-rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keamanan formal. Pendidikan agama pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ambon pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Baquala.

Data yang diperlukan, adalah data skunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan dengan profil pendidikan agama di daerah penelitian, konflik yang terjadi dalam masyarakat, dampak konflik terhadap implementasi pendidikan agama pasca konflik dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama di daerah tersebut.

Analisi data adalah data yang sifatnya kualitatif, terutama dari hasil wawancara bebas dan berhasil observasi diolah secara kualitatif sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian. Demikian pula dilakukan pengelompokan data dengan memperhatikan data yang sejenis dan data yang memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Kemudian diidentifikasi keterkaitan diantara data tersebut, terutama faktor yang menghubungkan dan interpretasi data dilakukan tanpa mengabaikan data emik dan etik.

### **IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **• Gambaran Singkat Lokasi Penelitian**

Kota Ambon adalah sebagai ibukota Propinsi Maluku dari 5 Kabupaten, yaitu Kotamadya Ambon, Maluku Utara, Maluku Tengah, Halteng dan Malra. Selain keudukannya sebagai ibukota Propinsi Taingkat I Maluku Kotamadya Ambon juga pusat pemerintahan perekonomian dan sebagainya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Th.1979 luas wilayah Kota Ambon seluruhnya 377 km<sup>2</sup> dan berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Th. 1980

luas daratan Kota Ambon tercatat 359,45 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Ambon, Baquala dengan luas 158,79 km<sup>2</sup> diikuti Kecamatan Sirimau seluas 112,31 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Nusaniwe seluas 88,35 km<sup>2</sup>.

- **Konflik Sosial di Ambon**

Maluku sebagai wilayah kepulauan sudah sejak zaman dahulu sarat akan konflik dengan kekerasan yang terjadi diberbagai lokasi di Maluku, baik di masa kolonial maupun di masa pasca kemerdekaan; adalah konflik horizontal antara kelompok masyarakat. Biasanya konflik horizontal antara kelompok-kelompok masyarakat dilandasi oleh suatu sentiment subyektif yang sangat mendalam yang diyakini oleh para warganya berupa sentimen kesukuan maupun sentimen keagamaan (Wawancara Ahmad, 25 Maret 2008), Konflik-konflik di Maluku bertambah besar frekuensinya setelah kedatangan Portugis dan Belanda yang membawa agama Kristen. Pergolakan yang berlangsung pada abad ke 16 dan 17 bukan hanya terjadi karena alasan ekonomi tetapi juga karena faktor agama (LeirissaR.Z,1999,h.6).

Pada masa lalu pertentangan orang Islam dan Kristen di Maluku dapat didamaikan dengan *Pela* (Dep. P dan K, 1978, h,79). Tetapi tampaknya hubungan seperti itu sekarang sudah mulai hilang. Orang-orang tua dulu sudah meninggal sementara generasi muda tidak melestarikannya (Ahmad Suedy, 2000, h.34).

Pada masa Orde Baru, masyarakat Ambon tampak rukun, namun ternyata di bawah permukaan penuh gejolak. Ternyata dalam 5 tahun terakhir sebelum kerusuhan di Ambon-Maluku terdapat banyak kerawanan sosial yang bernuansa agama. Hal ini tampak dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) di Ambon dengan responden 200 orang masing-masing 86 orang Islam, 68 orang Kristen, 42 orang katolik, 2 orang Hindu dan 2 orang Budha, hasilnya sebagai berikut: Kasus-kasus kerawanan di Maluku selama 5 tahun terakhir sebelum kerusuhan Ambon adalah sebagai berikut:

Maluku Tengah 100 kasus, Halmahera 69 kasus, Maluku Tenggara 43 kasus, Kodya Ambon 36 kasus, jenis kasusu tersebut adalah:

1. Perbedaan agama 71 kasus
2. Pendirian tempat ibadah 51 kasus
3. Penyiaran agama 48 kasus
4. Penodaan terhadap agama 37 kasus

5. kegiatan aliran sempalan 35 kasus
6. Perayaan hari-hari besar agama 32 kasus
7. Bantuan luar negeri 21 kasus
8. Iainnya 5 kasus (S. Simansari Ecip, 1999, h.149-150)

Menurut George Junus Adicondro (2001, h.140) secara internal yang membuat Ambon menjadi lahan subur bagi perang saudara adalah; (1) Arus masuk orang muslim non Ambon; (2) kehancuran sistem pemerintahan desa tradisional yang didasarkan pada adaptasi lokal dengan penerapan UU tentang Pemerintahan Desa No.5 Th. 1979; (3) meningkatnya kelangkaan tanah akibat urbanisasi; (4) timbulnya kelompok-kelompok preman dikalangan kaum muda Ambon yang kurang berpendidikan; (5) terjadinya erosi terhadap sistem aliansi tradisional antara desa Ambon yang disebut Pela.

Saat kerusuhan di Ambon yang berkobar sejak 19 Januari 1999, sesungguhnya telah didahului oleh beberapa peristiwa yang mengarah pada konflik antar kelompok yang bernuansa Sara'. Beberapa peristiwa tersebut seperti yang dikemukakan oleh S.Simansari Ecip antara lain adalah di Waialele, Air Bak dan Dolo.

• **Dampak Konflik Terhadap Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Dampak konflik terhadap pendidikan agama, sangat berpengaruh baik secara materil, fisik, korban jiwa maupun non materi dan/atau secara psikologi. Secara materi/fisik menurut ISAI melaporkan, bahwa saat kerusuhan mereda pada pertengahan Maret 1999 Kota Ambon nyaris tak berbentuk. Hampir seluruh bangunan fisik di Ambon hangus terbakar. Pemukiman terkotak-kotak, Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen.

Menurut laporan Gubernur Maluku tanggal 25-26 Januari 2002 korban konflik di Ambon, rumah penduduk 12.400 buah, rumah ibadah 87 buah, sarana kesehatan 6 buah, sarana pendidikan 40 buah dan 2 buah kompleks Perguruan Tinggi.

Dengan kompleksitas kerusuhan yang terjadi di Ambon, dampaknya kepada anak-anak sangat berpengaruh secara psikologi dan mental. Nampak pada anak-anak dengan melihat keadaan sekitarnya merasa putus asa, perasaan takut dan trauma, muncul sifat-sifat apatis, minat belajar kurang (wawancara Hasan Basri, 28 Maret 2008 di Ambon). Menurut Muhammad Shodik Kepala MAN (Ambon) memprediksikan bahwa pengaruh psikologi dan mental dari dampak konflik kepada anak-anak, khususnya anak-anak muslim mungkin berlangsung 10 tahun. Hal ini

mebutuhkan waktu jangka panjang bagi anak-anak Islam, penyebabnya antara lain kurangnya tenaga bimbingan dan penyuluhan di Madrasah. Di MAN I Ambon sampai sekarang belum ada guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP). Akibat lain anak-anak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah, adanya pemukiman terkotak-kotak. Penyebab ini anak-anak bertumpuh pada lingkungan sekolah, sehingga ada sekolah banyak muridnya, guru kurang, sebaliknya ada sekolah sedikit muridnya dan memiliki banyak guru. Akibatnya perbandingan guru Kristen dengan guru Islam 7:3 (Guru Kristen 7 orang dan guru Islam 3 orang) sedangkan muridnya Kristen hanya 3 orang dan murid Islam 7 orang (wawancara Muh. Shadik, 30-3-2008 di Ambon).

Dampak positif dari konflik di Ambon yaitu berkembangnya RA (raudatul Atfal) yang sebelumnya konflik RA hanya 1 buah dan sesudah konflik menjadi 5 buah. Kepala Seksi Madrasah Dep. Kota Ambon Rusdi Latokonsina, menyatakan: penyebab meningkatnya animo dan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan jumlah RA adalah berkaitan dengan dampak peristiwa konflik secara fisik maupun psikologi, khususnya anak-anak yang merasakan dan melihat keadaan sekitarnya. Anak-anak merasa cemas, trauma dan putus asa. Untuk memulihkan semangat kepada anak-anak, maka pendidikan agama di sekolah lebih efektif memberikan terapi secara psikologi. Penyebab lain adalah relokasi pemukiman penduduk, Islam dengan Kristen, Kristen dengan Kristen, sehingga memudahkan bagi orang tua memasukkan dan/atau menyekolahkan anak-anak mereka. (Wawancara tanggal 2 April 2008 di Ambon).

Masjid selain berfungsi sebagai pusat peribadatan, juga berfungsi sebagai tempat beraktifitas dakwah dan/atau pengajian baca Al-Qur'an (TPA-TKP) dan pengajian Majelis Taklim. Oleh karena itu, dengan banyaknya masjid yang hancur pada saat peristiwa kerusuhan/konflik di Ambon, maka sangat besar pengaruhnya terhadap aktifitas dakwah/pengajian baik bagi golongan anak-anak maupun terhadap orang dewasa.

Menurut Firman Gani (2002, 257-262), menyebutkan bahwa masjid yang hancur di Ambon pada saat kerusuhan konflik 65 buah, sedangkan laporan Gubernur Propinsi Maluku tanggal 25-26 Januari 2002, menyebutkan korban konflik rumah ibadah di Kota Ambon 87 buah masjid dan Gereja.

- **Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Secara umum, strategi kebijakan ditempuh pemerintah dalam rangka memperkokoh integrasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara



materil, maupun non materil dengan pendekatan komprehensif integral melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sosial budaya/pendidikan.

Untuk memulihkan integrasi antara kelompok Islam dan kelompok Kristen khususnya kepada anak-anak, maka pemerintah melaksanakan rekonsolidasi terutama pada perbatasan kedua kelompok tersebut untuk memulihkan keadaan anak-anak agar dapat belajar bersama (anak-anak dari pihak Islam dan anak-anak yang pihak Kristen). Selain itu pemerintah kota melaksanakan sistem pengajaran paedagogis, orang bersaudara untuk menyadarkan anak-anak bahwa semua orang bersaudara. Program ini dilakukan pada kurikulum dan ekstra kurikulum, ini sudah berjalan sejak tahun 2003.

Dalam bidang sosial-budaya dalam hal ini pendidikan, Pemerintah Daerah Propinsi Maluku dan Kota Ambon menyadari bahwa pendidikan sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia seutuhnya. Karena itu, pemerintah Daerah melaksanakan berbagai program intensif untuk menanggulangi dampak konflik terhadap pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan agama dan keagamaan baik di sekolah umum maupun di sekolah agama/madrasah.

Untuk ketersediaan prasarana dan sarana fisik yang menunjang berbagai kegiatan proses belajar mengajar, dari data Dinas pendidikan dan Olahraga Kota Ambon, pembangunan fisik gedung sekolah yang telah direhabilitasi dari TK/RA sampai dengan SMA/MA dan SMK, dari tahun 2001 sampai tahun 2007, ada tiga kategori yaitu, rusak berat, sedang dan ringan. Jumlah TK 1 buah rehabilitasi ringan, SD25 rehabilitasi berat, 145 buah rehabilitasi sedang, 20 buah rehabilitasi ringan, 9 buah bangunan baru, MI 1 buah rehabilitasi berat, 7 buah rehabilitasi sedang, 1 buah bangunan baru, SMP 3 buah rehabilitasi berat dan 2 buah rehabilitasi sdang, SMA2 buah rehabilitasi berat dan 2 buah bangunan bam, SMK 1 buah rehabilitasi ringan

Data Departemen Agama tiga tahun terakhir, tahun 2005-2007 bahwa madrasah yang memperoleh bantuan diantaranya, MAN I Ambon dalam bentuk RKB, MAS Al-Fatah dalam bentuk renovasi gedung, MTs Nurul Ikhlas dalam bentuk Musallah, MTs Al-Fatah dalam bentuk peralatan Lab. IPA, MTs Al-Muhajiran Waihetu dalam bentuk peralatan Lab. Bahasa, MTs Al-Khairat dalam bentuk Beasiswa, MTs N Ambon dalam kegiatan/pelatihan pada di bulan Ramadhan, MAN Ambon dalam bentuk buku, MI Nurul Ikhlas dalam bentuk Bloak Green, MI As-Salam dalam bentuk bantuan program MGMP, MI Cokro dalam bentuk bantuan operasional, MI Al-Kahar dan MI Ishak dalam bentuk MKKS. Selain itu 2 Perguruan Tinggi berupa bantuan sarana ibadah dan meubiler.

Meskipun gedung-gedung sekolah sudah direhabilitasi namun fasilitas

penunjang proses belajar mengajar terutama kekurangan guru, baik guru umum, maupun guru agama rasio murid/guru 3 tahun terakhir tahun 2005 - 12:1, tahun 2006=11:1 dan tahun 2007= 10:1.

- **Implementasi Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Pelaksanaan suatu lembaga pendidikan tidak akan diketahui pengembangannya apabila tidak dilaksanakan suatu pengkajian terhadap kinerja yang telah dan akan dilaksanakan. Kegiatan pendidikan yang sedang berlangsung di kota Ambon, bukanlah suatu berdiri sendiri, akan tetapi ia kait berkaitan dengan sistem dan komponen manusia dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka ada tiga indikator yang diamati, yaitu input, proses dan output. Hal dilakukan dilakukan di MAN I Ambon.

Salah satu keberhasilan dan peningkatan kualitas Madrasah adalah implementasi manajemen dan kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Madrasah MAN I Ambon, dari tahun ke tahun berbenah diri dalam penataan manajemen Madrasah. Pola manajemen yang diterapkan adalah menggunakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Pelaksanaan ini dengan mengedepankan pola pengambilan keputusan secara partisipatif dan bersifat bottom up.

Pelaksanaan MBM yang diterapkan dari perencanaan, pengorganisasian, actuating dan controlling yang diharapkan saat ini merupakan pola manajemen jangka panjang. Peninjauan jangka panjang dengan melibatkan semua stakeholder sebagian sudah membuahkan hasil. Pada kelompok iklim kerja yang kondusif, sudah mampu menciptakan tempat yang layak untuk proses belajar dan mengajar dengan membuahkan hasil menjadi madrasah yang sehat.

Pelaksanaan program dibarengi laporan pertanggungjawaban secara terbuka tiap satu semester, baik dari segi manajemen umum dan keuangan kepada seluruh orang tua siswa. Pola semacam ini membuahkan hasil semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah untuk berperan aktif ikut terlibat bersama madrasah mencapai target yang akan dicapai selalu bersama antara madrasah, komite dan unsur lain yang terkait termasuk pemerintah daerah.

### **Proses**

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses, antara lain: untuk dapat mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran, maka program-program dilaksanakan secara terencana dan tertentu. Didukung oleh pengelola tenaga kependidikan yang efektif, bukan sekedar pengetahuan tentang

apa yang diajarkan, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi bagaimana agar supaya peserta didik mampu belajar, cara belajar (*learning to learn*). Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut memperbaiki dan menyempurnakan.

Keterbukaan/transparansi dalam pengelolaan sekolah ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penggunaan uang dan sebagainya yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol.

#### **Output**

Kriteria peserta didik dinyatakan lulus secara rinci sesuai dengan ketentuan penilaian akhir dan ujian madrasah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan. Memberi Prosedur Operasi Standar (POS) tentang ujian nasional yang berlaku. Cermin prestasi jumlah siswa lulus tiga tahun terakhir dengan nilai rata-rata rendah dan tertinggi. Rasio jumlah siswa peserta ujian jurusan IPA dengan jumlah kelulusan dengan yang melanjutkan, tahun 2005 peserta ujian 115 orang, lulus 90% melanjutkan 40%. Tahun 2006 peserta ujian 183 orang lulus 95%, melanjutkan 45% dan tahun 2007 peserta ujian 196 orang lulus 97% melanjutkan 42%. Dan rasio jumlah siswa peserta ujian jurusan IPS tahun 2005 adalah 115 orang, lulus 93% melanjutkan 4,20%, tahun 2006 peserta ujian 183 orang, lulus 92% melanjutkan 43%, tahun 2007 peserta ujian 196 orang: lulus 95% dan yang melanjutkan 45%.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tragedi kerusuhan di Ambon merupakan konflik sosial bemuansa agama antara kelompok muslim dan Kristen. Pemicu utamanya sangat kompleks menyangkut beragam persoalan diseperti organisasi dan perebutan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, pranata budaya lokal yang tergusur, supremasi hukum yang mandul, fungsi-fungsi keamanan tumpul dan lainnya.

Kondisi dan situasi Ambon dewasa ini relatif membaik tergambar dari kegiatan Pemerintahan dan pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan agama dan keagamaan, pelayanan publik, transportasi lokal dan lintas daerah, usaha perekonomian dan masyarakat berjalan normal.

Berkat kebijakan dan usaha semua pihak, khususnya pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat kondisi pendidikan formal dan non formal khususnya pendidikan agama dan keagamaan relatif sudah membaik tergambar dari kegiatan belajar mengajar dan perkembangan evaluasi belajar hasil ujian nasional

dari tahun ke tahun semakin membaik, pengajian majelis taklim, TPA dan kebaktian sudah aktif, sarana dan prasarana pendidikan hampir seluruhnya sudah direhabilitasi, baik yang rusak berat, sedang dan ringan.

### Rekomendasi

Mencermati kondisi perkembangan kegiatan pendidikan agama dan keagamaan yang saat ini sudah berlangsung normal, maka salah satu strategi yang harus dikembangkan dalam upaya mengembangkan integrasi antar umat beragama adalah mengubah sistem pendidikan kita yang selama ini berorientasi pluralisme menjadi multikultural. Perubahan ini menyangkut isi buku-buku ajar, metode belajar mengajar. Dari sini diharapkan berkembang sikap saling menghargai, berinteraksi secara setara, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Negara (Pemerintah) harus memposisikan diri sebagai fasilitator yang baik dan adil bagi pola interaksi yang baru ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saudi, et, al, *Luka Maluku: Militer Terlibat, Institut Studi Arus Informasi, (ISAI)*, cetakan pertama, September, 2000, Jakarta.
- Bambang Wahyono, Letkol Pol. Dan Agus Wantono, Letkol Pol, "Laporan Hasil Wawancara dengan Pengembang Kebijakan Pelaksanaan Lapangan dan pihak yang terkait dalam kasus kerusuhan Ambon".
- , *Beberapa Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta, 1978
- Dep. P dan K: *Beberapa Segi Sejarah Daerah Maluku*, Jakarta, 1978.
- Dep P dan K: *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Maluku*, Jakarta. 1981/1982
- FirmanGani, Irjen Pol. Drs: *Pesan Jalanan Panjang Anak Bangsa Menuju Perdamaian*, diedit oleh H.D. Haryo Sasongko. lembaga Humaniora, Jakarta. 1, Juni 2002.
- George Junus Adicondro. " *Di Balik Asap Mesiu, Air Mata, dan Anyir aerah di Maluku*" dalam Zainin Salampessy dan Thamrin Husain (ed), *Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu, Tragedi Kemanusiaan Maluku di Balik Konspirasi Militer, Kapitalis, Birokrasi, dan kepentingan Elit Politik*. Tapak Ambon, Jakarta, Juli 2001.
- Leirissa. R.Z., et, al, *Sejarah Kebudayaan Maluku*, Departemen P dan K. Jakarta, 1999
- , *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Lembaga Sejarah Universitas Indonesia, 1978.
- Parsudi Suparlan. et. el, *Laporan Hasil Penelitian Kerusuhan Ambon dan Rekomendasi Penanganannya*. Jakarta, Maret 1999.
- , *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*, Jakarta 1978
- S. Simansari Ecip, *Menyulut Ambon: Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusuhan Linias Wilayah di Indonesia*, Mizan. Bandung. Cetakan pertama. November 1999.